



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN JUI TAHUN 2023


PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUI TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2023 dapat dibuat. Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Kecamatan Juai Tahun 2023 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008.

Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2023 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Juai, Agustus 2023
Camat Juai,

NANANG EDWARD, S.Sos., MM.
NIP.19880212 201001 2 016

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang.....	<i>1</i>
1.2. Tujuan.....	<i>2</i>
1.3. Landasan Hukum.....	<i>5</i>
1.4. Sistematika Penulisan.....	<i>7</i>
<i>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022</i>	<i>9</i>
2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	<i>9</i>
2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota.....	<i>10</i>
2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>19</i>
2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>20</i>
2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	<i>23</i>
2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>23</i>
2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>25</i>
2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi.....	<i>31</i>
<i>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2022</i>	<i>39</i>
<i>BAB IV PENUTUP</i>	<i>51</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang deponitif. Dalam penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2023 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Juai dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai dimulai dari usulan setiap Seksi dan juga dari Sekretariat atau PPTK, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Juai untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan. Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Juai menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian IKU Kantor Kecamatan Juai sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan bulan Juni
Tahun 2023 Kecamatan Juai**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,60	87,51	99,89%
Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan	Skor IDM desa	0,6390	0,6746	105,57%

Perolehan nilai realisasi sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 87,51 diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada 25 responden yang membutuhkan pelayanan pada kantor Kecamatan Juai per semester pertama tahun 2023. Sedangkan hasil realisasi untuk sasaran meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan diperoleh dari rata-rata nilai skor IDM 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 09 Juni 2023 dimana hasilnya mencapai nilai skor rata-rata 0,6746.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Kecamatan Juai sampai dengan semester I Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkriteria sangat baik, dengan capaian sebesar 99,89%, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Formula Perhitungan		
Total Nilai IKM yang dicapai	X	100%
----- Target IKM		

Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran IKU meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Tabel Program Pendukung IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Program	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	77.438.100	37.920.700	48,97%	100%	50%	50%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.368.107. 391	1.634.459. 955	48,53%	67,00	72,70	108,51%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82.544.500	41.174.500	49,88%	100%	50%	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	247.950.400	45.611.100	18,4%	100%	50%	15%

Sedangkan untuk capaian IKU Kecamatan Juai tentang meningkatnya kualitas kemandirian desa sebagaimana yang telah disampaikan di atas mencapai angka capaian

sebesar 0,6746 dari target sebesar 0,6390 atau sekitar 105,57%. program dan kegiatan prioritas yang mendukung sasaran IKU meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan terdapat pada 2 (dua) program sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1
Tabel Program Pendukung IKU Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan

No	Program	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	409.121.300	52.894.300	12,93	100%	100%	100%
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	163.236.300	74.840.800	45,85%	100%	50%	50%

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Juai Tahun 2023 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 7. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No.8 Thn 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 8. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2017
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
15. PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No.05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 - 2026.
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II LAPORAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

2.2 Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

3.1 Rancangan Rencana Kerja Perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Juai Tahun 2023, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Juai 2021-2026.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2023 per Semester I Kecamatan Juai melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.348.397.991,- dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2023 mencapai 43,39 % atau sebesar Rp.1.886.901.355,-.

2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai per semester I tahun 2023 Kecamatan Juai perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang Kecamatan Juai tahun 2023. Berikut disampaikan penjelasan terperinci atas ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Juai semester 1 tahun 2023.

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota

2.1.1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Kecamatan Juai

- Output : Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 (dua) dokumen atau 100%

Realisasi fisik kegiatan adalah berupa dokumen renja 2024 dan dokumen renja perubahan 2023 sedangkan terhitung sampai dengan juni 2023, kedua dokumen tersebut telah mulai disusun.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 41,97 %

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 61.608.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 25.858.000,00

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- Tujuan : penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Kecamatan Juai

- Output : Jumlah dokumen RKA dan DPA

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 100 %

Realisasi fisik kegiatan berupa dokumen RKA 2024 dan dokumen RKA Perubahan 2023 sedangkan terhitung sampai dengan semester I tahun 2023,

kedua dokumen tersebut telah mulai disusun.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 15,81%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 5.879.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 929.600,00

c. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Tujuan : Terlaksananya penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

- Output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 100 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan adalah penyusunan laporan kinerja (LKIP) dan laporan pertanggungjawaban (LKPj) Kecamatan Juai. Kedua laporan tersebut telah selesai disusun dan rilis nilai dokumennya sehingga dapat dikatakan bahwa kedua target penyusunan dokumen telah terealisasi.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 17,79%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 5.660.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.006.900,00

2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 18 orang per bulan atau 81,82 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan adalah berupa jumlah orang ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya dimana target capaian adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ASN sedangkan jumlah orang ASN sampai bulan juni 2023 adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang ASN.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 50,54%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.798.827.791,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.414.658.189,00

b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

- Tujuan : Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 2 (dua) dokumen atau 50 %

Realisasi fisik kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan dan

verifikasi/pengujian keuangan SKPD yang ditandai dengan disusunnya laporan realisasi kinerja dan keuangan per triwulan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 37,27%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 88.541.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.33.000.000,00

2.1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

- Tujuan : Terlaksananya keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 4 (empat) orang atau 26,67 %

Realisasi fisik kinerja sub kegiatan tersebut di atas adalah jumlah ASN yang ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dimana per semester I tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 (empat) orang atau kali keikutsertaan ASN Kecamatan Juai dalam pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga penyelenggara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 88,97%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.720.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.420.000,00

2.1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kecamatan Juai

- Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 1 (satu) paket atau 100%

Realisasi fisik dari kinerja sub kegiatan tersebut di atas adalah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Juai dimana target tahun 2023 adalah 1 (buah) paket dan telah terealisasi sejak triwulan I.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 100%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.460.900,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.460.900,00

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

- Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0%

Realisasi fisik kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya 1 (satu) paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 10.706.800,- dan 1 (satu) buah AC standing seharga Rp.29.349.600,-.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 01,17%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 40.706.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 474.800,00

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 1 (satu) paket atau 100%

Realisasi fisik kinerja sub kegiatan tersebut berupa pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang telah terealisasi sebanyak 1 (satu) paket sejak triwulan I.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 43,93%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 25.040.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.000.000,00

d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Tujuan : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau terealisasi sebanyak 6 (enam) laporan bulanan dari target 12 (dua belas) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 09,63%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 29.920.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.880.000,00

2.1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 47,63%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 38.260.200,00 sedangkan realisasi

keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.8224.000,00

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50 % atau 6 (enam) laporan dari target 12 (dua belas) laporan
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 40,87%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 100.905.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 41.242.766,00.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tujuan : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 26,90%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.133.800,00 sedangkan realisasi

keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.650.000,00

2.1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Tujuan : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas/operasional baik roda dua maupun roda 4.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 54,35%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 69.061.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.37.533.500,00

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan

lainnya

- Tujuan : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
- Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 2 unit gedung

Realisasi fisik kegiatan tersebut di atas adalah terpeliharanya 2 (dua) buah gedung milik kantor kecamatan juai sebagaimana tercantum dalam dokumen

asset Kecamatan Juai yaitu gedung kantor utama dan gedung aula di samping gedung utama yang ditandai dengan pembayaran honorarium penjaga malam dan security atau satpam yang bertugas menjaga keamanan gedung kantor Kecamatan Juai serta pembelian bahan kebersihan dan alat keamanan.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 2 (dua) unit.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 45,11%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 93.381.300,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.42.121.300,00

2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1.2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Tujuan : Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 50,07%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 68.737.700,00 sedangkan realisasi

keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.34.417.700,00

2.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
 - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 40,26%
 - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.8.700.400,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.503.000,00

2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1.3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Tujuan : Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum ada realisasi kinerja dari target 4 (empat) lembaga kemasyarakatan.
 - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 0%
 - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 5.129.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Tujuan : Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Output : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
 - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 41,99%
 - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 39.924.900,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.764.900,00.
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Tujuan : Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan

- Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau 0 laporan
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 0,07%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 84.080.860,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 182.900,00

2.1.3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

- Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum ada realisasi kinerja dari target 50 (lima puluh) keluarga.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 33,95%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 491.409.037,00 sedangkan realisasi

keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 35.946.500,00

2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1.4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Tujuan : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Output : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 49,88%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 56.060.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.41.174.500,00

2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.1.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Tujuan : Terlaksananya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum terealisasi dari target kinerja 450 (empat ratus lima puluh) orang.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 27,02%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 72.747.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.19.656.600,00

b. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

- Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
- Output : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau terealisasi 1 (satu) laporan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Balangan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 14,81%

Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 175.203.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.25.954.500,00.

2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.6.1 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 28,14%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 57.915.300,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.300.000,00

b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Output : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 44,57%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 59.602.600,00 sedangkan realisasi

keuangan sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.562.600,00

c. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- Tujuan : Terlaksananya fasilitasi desa untuk menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu
- Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100%.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 69,95%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 45.718.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.978.200,00.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa tingkat pencapaian target kinerja seluruh sub kegiatan berada pada nilai sekitar 71,61% dan capaian target keuangan sekitar 43,39%. Meskipun dalam peringkat rendah jika dibandingkan dengan pencapaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun namun untuk perhitungan periode semester pertama, capaian tersebut telah mencapai predikat tinggi. Hal ini di dorong dengan adanya faktor pendorong berupa jenis indikator setiap kegiatan yang berupa persentase dan jumlah laporan/dokumen penyediaan layanan/pelaksanaan kegiatan yang berjumlah 1 (satu) laporan/dokumen. Sedangkan faktor penghambat dari capaian target semester pertama adalah terdapat belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tidak dapat

direalisasikan dikarenakan kesalahan dalam penentuan harga satuan yang tidak sesuai dengan harga pasar dan perlu dilakukan pergeseran anggaran di anggaran perubahan tahun 2023. Laporan capaian kinerja dan keuangan sampai semester I tahun 2023 dapat dilihat lebih jelas pada tabel hasil evaluasi renja Kecamatan Juai triwulan II Tahun 2023 di bawah ini.

2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi

Setiap perencanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah akan selalu berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dari hasil pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berikut adalah analisis dampak sosial dan ekonomi atas pelaksanaan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan pada Kecamatan Juai Tahun 2023 :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berdampak terhadap sosial masyarakat dikarenakan perencanaan perangkat daerah penting untuk dilaksanakan untuk merencanakan penganggaran terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik dimana masyarakat selaku penerima manfaat layanannya.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Demikian pula halnya dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Ketika dokumen perencanaan Kecamatan Juai telah di susun maka langkah berikutnya adalah penyusunan dokumen anggaran atau RKA SKPD. Dengan adanya dokumen anggaran berupa RKA SKPD maka kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan lancar dikarenakan adanya dukungan pendanaan atas kegiatan tersebut oleh pemerintah. Hal itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Juai terhadap masyarakat

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD memungkinkan bagi masyarakat untuk memonitoring penggunaan dana APBD yang salah satu sumbernya adalah pajak yang dibayar oleh masyarakat. Laporan tersebut juga diunggah secara daring agar dapat diakses oleh masyarakat.

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi hak ASN selaku abdi masyarakat. Dengan terpenuhinya hak ASN sebagai peningkatan kesejahteraan ASN yang bersangkutan maka ASN tersebut dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi ASN dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan daerah yang baik dan benar sehingga pendayagunaan kedua sumber daya tersebut dilaporkan kepada masyarakat dengan benar dan mudah diakses.

6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ASN pemerintah daerah Kabupaten Balangan selaku pengabdian masyarakat yang harus memberikan pelayanan publik secara optimal.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan kebutuhan kantor berupa komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tentunya penting untuk menunjang pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Pelayanan publik yang optimal akan berdampak baik ke kehidupan sosial masyarakat.

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertujuan untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan ASN demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Meski tidak berdampak langsung kepada sosial masyarakat namun hal tersebut juga berkontribusi terhadap lancarnya pelayanan publik.

9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan dilaksanakan untuk menyediakan bahan untuk mencetak dan menggandakan berkas pelayanan pemerintah daerah. Dengan bahan persiapan pelaksanaan pelayanan publik yang lengkap tentunya akan mendukung pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sama halnya dengan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor maka sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD juga tidak berdampak langsung dengan masyarakat namun harus disediakan pendanaan dan pelaksanaan kegiatannya agar memudahkan ASN dalam memfasilitasi penyelesaian pelayanan publik kepada masyarakat.

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan manajemen surat masuk dan keluar pada instansi pemerintah wajib dikelola dengan baik dan benar untuk memudahkan ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika seluruh dokumen fisik terkelola dengan baik maka memudahkan ASN dalam menyelesaikan dokumen-dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan.

12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertujuan menyediakan pendanaan untuk kebutuhan listrik, air dan telepon/internet pemerintahan daerah yang walaupun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat namun wajib dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.

13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana perbaikan atas peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Dengan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor maka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh ASN lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan tersedianya pendanaan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional maka aset pemerintah daerah tersebut akan terpelihara dengan baik dan memberi manfaat yang lebih lama bagi ASN dalam melaksanakan pelayanan publik.

15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Demikian pula halnya dengan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sama maksud dan tujuannya dengan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Meski tidak berdampak langsung terhadap sosial masyarakat namun tetap berkontribusi dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas hasil pelayanan kepada masyarakat.

16. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dalam sub kegiatan ini disediakan pendanaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Juai seperti penyediaan makanan minuman pelayanan publik dan rapat penyusunan laporan monev hasil pelayanan publik.

17. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dalam sub kegiatan ini disediakan pendanaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Juai seperti pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa mengenai prosedur pelayanan publik dan penyediaan bahan penyelenggaraan pelayanan publik.

18. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana bagi seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa untuk memberikan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang desa yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agenda kegiatan tersebut.

19. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sub kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana bagi seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa untuk memberikan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang desa yang

diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agenda kegiatan tersebut. Diharapkan dengan terlibatnya masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa maka perencanaan pembangunan desa akan lebih terarah dan tepat sasaran.

20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah Kecamatan Juai. Salah satunya dengan cara membina dan memberdayakan UMKM di desa khususnya BUMDes agar lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sekitar BUMDes.

21. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan sub kegiatan ini sangat penting dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Juai khususnya karena dengan terlaksananya sinergitas dengan instansi lintas sektor di sekitar pemerintah daerah Kecamatan Juai maka akan menciptakan lingkungan kehidupan yang aman dan kondusif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.

22. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dana pelaksanaan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Juai. Kegiatan dimulai dari seleksi paskibra tingkat kecamatan, latihan, pengukuhan paskibra, renungan suci di makam pahlawan dan peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau Peringatan 17 Agustus Tingkat Kecamatan. Adanya peringatan hari kemerdekaan ini penting dilaksanakan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Juai serta

menumbuhkan semangat pengamalan Pancasila.

23. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Bukan hanya kebutuhan fisik masyarakat yang harus dipenuhi, namun juga kebutuhan batin masyarakat juga perlu dipenuhi. Lingkungan Kecamatan Juai dapat diasumsikan lebih istimewa dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan karena di Kecamatan Juai terdapat tempat wisata religius seperti makam datu kandang haji dan makam pahlawan dimana setiap tahun terdapat agenda yang harus dilaksanakan untuk memperingati kedua makam tersebut. Kecamatan Juai bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam acara peringatan di kedua tempat tersebut dan mengkoordinasikannya dengan instansi-instansi terkait di luar Kecamatan Juai

24. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum desa oleh seksi pemerintahan umum Kecamatan Juai kepada seluruh aparat di 21 (dua puluh satu) desa Kecamatan Juai. Selain dalam rangka memenuhi kewajiban desa dalam menyusun buku-buku pemerintahan umum yang seringkali diperlukan ketika desa mengikuti lomba desa, seksi pemerintahan umum Kecamatan Juai juga memfasilitasi pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa yang menjadi agenda penyelenggaraan pemerintahan desa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dengan terpenuhinya dokumen pemerintahan umum desa dan penetapan batas desa maka diharapkan tingkat keterbukaan pemerintahan desa terhadap masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

25. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sub kegiatan ini menyediakan dana bagi ASN Kecamatan Juai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa di 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai. Dengan tertibnya administrasi desa dalam mengelola

keuangan dan pendayagunaan aset desa maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan desa tersebut.

26. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan dana pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kecamatan sekaligus pendampingan atas pelaksanaan musrenbang desa dimana hasil dari musrenbang langsung berdampak baik aspek sosial maupun ekonomi tergantung dari jenis usulan musrenbang yang diakomodir pemerintah daerah Kabupaten Balangan maupun yang difasilitasi pengusulannya ke pemerintah provinsi/pusat.

Selain analisis dampak sosial dan ekonomi terhadap anggaran sub kegiatan yang diampu oleh Kecamatan Juai tahun 2023, juga terdapat analisis atas dampak sosial dan ekonomi atas beberapa kebijakan di luar anggaran yang tersedia seperti penyediaan layanan samsat bantu juai dan layanan restorative justice Kecamatan Juai. Layanan samsat bantu juai merupakan upaya peningkatan layanan publik Kecamatan Juai dimana sebelum pelaksanaan layanan samsat dilakukan melalui mobil samsat keliling yang hadir memberikan layanan samsat setiap hari selasa di halaman kantor Kecamatan Juai. Dengan disediakannya satu ruangan di kantor Kecamatan Juai untuk keperluan samsat bantu juai maka penyediaan layanan samsat bisa dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan jumat pada saat jam kerja. Tentunya dengan adanya samsat bantu juai berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Juai yaitu kemudahan mengakses layanan samsat setiap hari kerja dan lancarnya layanan pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara sebagai salah satu PAD yang berasal dari masyarakat Kecamatan Juai.

Sedangkan kebijakan pembentukan ruang restorative justice di kantor Kecamatan Juai dan seluruh desa di Kecamatan Juai bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menerima layanan penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan. Hal ini berdampak pada aspek sosial masyarakat yang memudahkan masyarakat mendapatkan keadilan hukum tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan waktu ke pengadilan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan yang

berada di luar wilayah Kecamatan Juai.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis sosial dan ekonomi dari setiap sub kegiatan dan kebijakan di luar anggaran yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai tahun 2023 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai selalu berdampak terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Juai baik secara sosial (keadaan aman, kondusif dan kemudahan menerima layanan publik) maupun ekonomi (peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas layanan publik).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2023 penting untuk disusun sebagai dasar penyusunan APBDP Kecamatan Juai Tahun 2023 dimana dokumen tersebut berisi informasi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatifnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan Kecamatan Juai Tahun 2023. Keterbatasan sumber daya pendanaan saat penetapan APBD murni tahun 2023 dapat diatasi dengan adanya penambahan atau pegeseran anggaran pada saat penyusunan APBD Perubahan tahun 2023.

Sebagaimana penganggaran pada APBD murni tahun 2023, pada APBD Perubahan Kecamatan Juai tahun 2023 juga terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Namun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa dikarenakan keterbatasan sumber daya pendanaan di APBD murni tahun 2023 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga pada kesempatan penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 Kecamatan Juai diberikan penambahan maupun pergeseran anggaran dari sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan ke beberapa sub kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 61.608.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp.13.980.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 75.588.600,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan untuk 4 (empat) orang dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer dari Rp. 1.100.000,00 menjadi Rp.1.300.000,- serta Rp.1.320.000,00 menjadi Rp. 1.500.000,00 terhitung sejak Januari 2023.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.5.660.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 4.861.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 10.522.500,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian kertas, bahan cetak, makan minum rapat/sosialisasi penggunaan alat bantu kurkinku dan biaya perjalanan dinas dalam kota.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.88.541.200,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 17.640.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 106.181.200,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan untuk 5 (lima) orang dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer dari Rp. 1.100.000,00 menjadi Rp.1.300.000,00 besaran honorarium Rp.1.540.000,00 menjadi Rp. 1.700.000,00 dan besaran honorarim Rp.1.760.000,00 menjadi Rp. 1.900.000,00 per orang dihitung sejak Januari 2023 serta iuran JKK dan JKM non ASN.
4. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.2.720.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 78.880.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 81.600.000,00. Adapun alasan penambahan adalah kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/workshop/FGD/sosialisasi dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Juai.
5. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.40.706.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 75.350.700,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 116.057.500,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya keperluan untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa ATK, belanja penggandaan, pembelian tiang umbul-umbul, AC dinding, sound system, tiang mic, computer all in one dan laptop.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.25.040.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 100.600.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 125.640.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer baru sebanyak 12 (dua belas) bulan untuk 6 (enam) orang dan 1 (satu) bulan untuk 2 (dua) orang serta kenaikan besaran honorarium tenaga honorer dari Rp. 1.100.000,00 menjadi Rp.1.300.000,00.

7. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 29.920.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 50.169.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 80.089.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kebutuhan penambahan belanja makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/sosialisasi/seminar dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.38.260.200.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 32.275.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 70.536.100,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk belanja alat tulis kantor, kekurangan pembayaran tenaga honorer sebanyak 3 (tiga) bulan untuk 3 (tiga) orang dan kenaikan besaran honorarium dari sebesar Rp. 1.100.000,00 per bulan menjadi Rp.1.300.000,00 per bulan terhitung sejak januari 2023.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.100.905.000,00 dan dilakukan pengurangan dengan pergeseran anggaran sebesar Rp. 34.431.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 135.336.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kemungkinan kenaikan penggunaan dana pada akun

belanja sumber daya air dan listrik tahun 2023.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.6.133.000,00 dan dilakukan pengurangan dengan pergeseran anggaran sebesar Rp. 1.700.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 7.833.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana atas biaya perbaikan peralatan kantor berupa laptop dan personal computer untuk tahun 2023.

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.69.061.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 21.284.750,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 90.346.350,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran BBM mobil dinas yang bertambah jumlah asetnya, suku cadang mobil, biaya pajak mobil dan biaya service mobil.

12. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 93.381.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 26.182.700,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 119.564.00,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian bahan pembersih, kekurangan pembayaran gaji sebanyak 1 (satu) bulan untuk honorer penjaga malam dan kebersihan sebanyak 7 (tujuh) orang serta kenaikan gaji honorer tersebut terhitung sejak Januari 2023.

13. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.68.737.700,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 17.480.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 86.217.700,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana pembayaran 1 (satu) bulan gaji bagi 5 (lima) orang Tenaga honorer serta kenaikan besaran gaji terhitung sejak Januari 2023.

14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.8.700.400,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 1.350.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 10.050.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan kebutuhan atas biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Juai.

15. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.39.924.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 23.162.500,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 63.087.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian kertas, bahan cetak, bahan komputer, biaya makanan dan minuman rapat, kekurangan pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan untuk 3 (tiga) orang tenaga honorer serta kenaikan besaran honorarium tenaga honorer sejak Januari 2023.

16. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.258.182.900,00 dan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 252.352.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 5.830.000,00. Adapun alasan pengurangan anggaran adalah adanya kelebihan dana untuk pembayaran jasa pelayanan umum berupa honorarium pejabat RT yang telah dianggarkan oleh APBDes dan digeser menjadi anggaran pelaksanaan kegiatan rembuk stunting kecamatan dan sisa dananya digeser ke sub kegiatan lainnya yang memerlukan penambahan dana.

17. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.105.884.300,00

dan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 19.229.400,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 125.113.700,00. Adapun alasan penambahan anggaran adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian bahan pameran/lomba PKK, makan dan minum rapat, kekurangan gaji 1 (satu) bulan untuk 2 (dua) orang Tenaga honorer, dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer sejak Januari 2023.

18. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.82.544.500,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 37.334.300,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 119.878.800,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian kertas, bahan komputer, makan dan minuman rapat, honorarium pelatih Linmas, biaya perjalanan dinas dalam daerah, kekurangan dana 1 (satu) bulan honorarium tenaga honorer sebanyak 6 (enam) orang dan kenaikan besaran honorarium Tenaga honorer sejak Januari 2023.

19. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.72.742.200,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 70.666.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 143.414.100,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian kertas, bahan cetak, bahan komputer, seragam paskibra, makanan dan minuman rapat/kegiatan/latihan, honorarium petugas upacara kemerdekaan RI, biaya perjalanan dinas dalam kota, kekurangan pembayaran 3 (tiga) orang tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan dan kenaikan besaran honorarium Tenaga honorer terhitung sejak bulan Januari 2023.

20. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.175.203.200,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 22.619.200,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 197.822.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian seragam tim official MTQ Kecamatan Juai, belanja makanan dan minuman pelaksanaan MTQ kabupaten, kekurangan dana pembayaran tenaga honorer sebanyak 3 (tiga) orang selama 1 (satu) bulan dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer terhitung sejak bulan Januari 2023.

21. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.57.915.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 31.648.600,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 89.563.900,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk belanja bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, serta kekurangan dana pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) orang selama 1 (satu) bulan dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer terhitung sejak bulan Januari 2023.

22. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.59.602.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 28.787.600,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 88.390.200,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian kertas, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, kekurangan dana pembayaran tenaga honorer sebanyak 3 (satu) orang selama 1 (satu) bulan dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer terhitung sejak bulan Januari 2023 serta penambahan dana untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah.

23. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.45.718.400,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.000.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 52.718.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya

kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer sebanyak 2 (dua) orang selama 1 (satu) bulan dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer terhitung sejak bulan Januari 2023.

Alokasi anggaran pada APBD perubahan tahun 2023 pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2023**

SKPD : KECAMATAN JUAI

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	67,00 nilai	67,00 nilai	3.368.107.391	3.825.463.341	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	73.148.800	91.990.700	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	61.608.600	75.588.600	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	5.879.600	5.879.600	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	5.660.600	10.522.500	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer dan penambahan pembelian bahan kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 Bulan	12 Bulan	2.887.368.991	2.905.008.991	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	2.798.827.791	2.798.827.791	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	88.541.200	106.181.200	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer dan JKK JKM honorer
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.720.000	81.600.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang/perjalanan	15 Orang/perjalanan	2.720.000	81.600.000	Penambahan anggaran SPPD luar daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	97.127.700	323.247.400	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.460.900	1.460.900	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.706.800	116.057.500	Penambahan anggaran untuk pembelian bahan pelaksanaan kegiatan, pengadaan tiang umbul-umbul, tiang mic, computer all

							in one dan laptop
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.040.000	125.640.000	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	29.920.000	80.089.000	Penambahan anggaran SPPD luar daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	145.299.000	213.705.900	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	38.260.200	70.536.100	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.336.000	135.336.000	Penambahan anggaran pembayaran biaya listrik dan air
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.133.800	7.833.800	Penambahan biaya pemeliharaan PC dan laptop
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	162.442.900	209.910.350	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	69.061.600	90.346.350	Penambahan biaya operasional dan pemeliharaan mobil
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	93.381.300	119.564.000	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	77.438.100	96.268.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	68.737.700	86.217.700	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	68.737.700	86.217.700	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	8.700.400	10.050.400	
16	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	8.700.400	10.050.400	Penambahan anggaran perjalanan dinas dalam daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	100%	100%	409.121.300	199.160.300	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	303.237.000	74.046.600	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.129.200	5.129.200	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.924.900	63.087.400	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	258.182.900	5.830.000	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer serta pengurangan gaji RT
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	105.884.300	125.113.700	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	50 Keluarga	105.884.300	125.113.700	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	100%	82.544.500	119.878.800	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	82.544.500	119.878.800	
18	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	82.544.500	119.878.800	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum	100%	100%	247.950.400	341.236.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	247.950.400	341.236.500	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 Orang	450 Orang	72.747.200	143.414.100	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
19	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	175.203.200	197.822.400	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	100%	163.236.300	230.672.500	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan	100%	100%	163.236.300	230.672.500	

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	57.915.300	89.563.900	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer	
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	100%	59.602.600	88.390.200	Penambahan biaya pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian pagu gaji tenaga honorer	
23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%	45.718.400	52.718.400	Penyesuaian pagu gaji tenaga honorer	
TOTAL PAGU ANGGARAN					4.348.397.991	4.812.679.541		

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini tentunya dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam membuat rencana kegiatan berikutnya. Dan merupakan bahan evaluasi dalam pembuatan rencana kerja anggaran perubahan tahun 2023, yang dituangkan dalam DPA-SKPD Kecamatan Juai.

Dengan adanya program dan kegiatan di atas diharapkan dapat mewujudkan visi misi SKPD Kecamatan Juai, diharapkan akhir tahun 2023 evaluasi kinerja berdasarkan Renstra dapat tercapai maksimal menuju target 100%.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD Kecamatan Juai ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juai, Agustus 2023


Camat,
NANANG EDWARD, S.Sos., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800127 200604 1 016